

ABSTRAK

Kegiatan pengelolaan keuangan sudah pasti dilakukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik. Pada organisasi sektor publik, kegiatan pengelolaan keuangan sangat penting untuk diawasi dikarenakan anggaran yang digunakan adalah anggaran yang berasal dari negara atau uang masyarakat yang diambil dari pajak. Kegiatan pengelolaan keuangan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006. Dalam penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Provinsi Bali, penulis bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas untuk mengetahui apakah kegiatan pengelolaan kas tersebut telah sesuai dengan pedoman yang ada dan untuk mengetahui kelemahan sistem yang nantinya penulis dapat memberikan saran atau alternatif solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus deskriptif. Dimana penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan kas telah berjalan dengan baik dan lancar, maka penulis membagi hal-hal penting terkait pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas di dinas pendapatan yakni fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, dan juga sistem prosedur pelaksanaan di dinas tersebut.

Setelah dilakukan analisis, diperoleh temuan bahwa pelaksanaan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas sudah dilakukan sesuai dengan pedoman berlaku, namun ada beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan, misalnya penerapan sistem yang terkomputerisasi yang belum berjalan secara optimal. Selain itu dalam pengelolaan keuangan daerah banyaknya pemakaian dokumen untuk pelaksanaannya dapat membingungkan staf pelaksana walaupun bagus dalam hal pengendalian internal, dan banyaknya pihak yang terlibat dapat mengurangi keefisienan dari pengelolaan keuangan itu sendiri. Penerapan sistem yang terkomputerisasi sangat diperlukan sebagai alat untuk meningkatkan konsistensi akan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang transparan dan penambahan wewenang pada kepala sub bagian keuangan juga diperlukan.

Kata kunci: Organisasi Sektor Publik, Sistem Informasi Akuntansi, Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas.